

**PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI PROGRAM SEKOLAH
LAPANGAN PENGENDALIAN HAMA TERPADU DI KABUPATEN
BINTAN TAHUN 2014**

NASKAH PUBLIKASI



Oleh:

**ANDIKA SLAMET KARYADI
NIM :100565201089**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2017**

**EVALUASI PROGRAM BANTUAN POMPONG DINAS KELAUTAN
PERTANIAN PERIKANAN KEHUTANAN DAN ENERGI (KP2KE)
TANJUNGPINANG DI KELURAHAN DOMPAK TAHUN 2015**

ANDIKA SLAMET KARYADI

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Maritim Raja Ali Haji

A B S T R A K

Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani. Kemudian bentuk pemberdayaan yang dilakukan pemerintah lainnya adalah dalam program Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu. Namun di lapangan masih ditemui permasalahan hal ini dapat dilihat dari Di Kabupaten Bintan ada 75 petani yang sudah mengikuti Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu sehingga masih banyak petani yang belum mengikuti program ini.

Tujuan dalam penelitian ini Untuk mengetahui Pemberdayaan Petani Melalui Program Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu Di Kabupaten Bintan Tahun 2014. Informan dalam penelitian ini adalah sebelas orang yang terdiri dari kelompok tani, anggota kelompok tani dan petugas supervisi dan pemandu lapangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Pemberdayaan Petani Melalui Program Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu Di Kabupaten Bintan belum berjalan sebagaimana mestinya, masih ada yang harus diperbaiki. Akses dalam program ini sangat terbatas karena pemerintah kurang terbuka dalam pelaksanaan program ini sehingga tidak semua petani mampu merasakan program ini

Kata Kunci : Pemberdayaan, Petani.

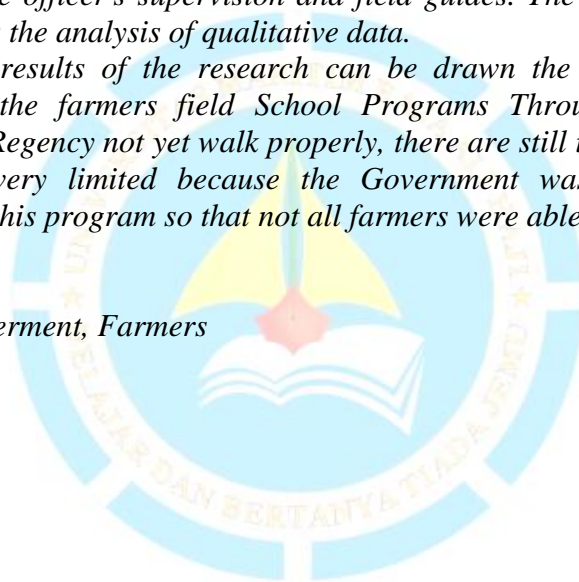
ABSTRACT

Empowerment of Farmers is any effort to improve the ability of farmers to implement a better Farmer through education and training, counseling and mentoring, the development of systems and means of agricultural marketing, consolidation and guarantee a total area of agricultural lands, ease of access to science, technology and information, as well as Institutional strengthening of farmers. Then form a Government empowerment is another field school program in Integrated Pest Control. But the field still encountered problems of this can be seen from Bintan Regency there are 75 farmers who already follow field school Integrated pest control so there are still plenty of farmers who have not been following this program.

The purpose of this research is to know in the Empowerment of the farmers field School Programs Through Integrated Pest Control In Bintan by 2014. Informants in this study are the eleven people that consists of a group of farmers, farmer groups and members of the officer's supervision and field guides. The analysis of the data used in this study is the analysis of qualitative data.

Based on the results of the research can be drawn the conclusion that the Empowerment of the farmers field School Programs Through Integrated Pest Control In Bintan Regency not yet walk properly, there are still to be fixed. Access in this program is very limited because the Government was less open in the implementation of this program so that not all farmers were able to feel the program

Keywords: *Empowerment, Farmers*



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat memberikan kesempatan pada masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan hingga menikmati hasil pembangunan tersebut. Pembangunan dapat berjalan dengan baik bila adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dan segenap masyarakat. Pada pembangunan partisipatif masyarakat berperan aktif dalam pembangunan, turut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pada model *top down*, masyarakat ditempatkan sebagai obyek dalam pembangunan. Negara/pemerintah memiliki peranan yang lebih dominan dibandingkan dengan masyarakat. Masyarakat pada lapisan bawah tidak mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan, termasuk juga pada hal-hal yang secara langsung berkaitan dengan kehidupannya (Soetomo, 2013).

Selama ini Badan Pusat Statistik selalu menyajikan data bahwa penduduk miskin dipedesaan cenderung lebih besar jika dibandingkan dengan daerah perkotaan. Data ini secara implisit menyatakan penduduk yang bertumpu pada sektor agraris adalah miskin dibandingkan dengan yang berada di sektor lainnya. Kondisi ini terjadi karena petani di Indonesia rata-rata mempunyai keterbatasan yang lebih merupakan karakteristik mereka, yaitu keterbatasan sarana produksi, kepemilikan lahan, akses

permodalan, informasi dan teknologi, akses pasar dan infrastruktur produksi.

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang sampai sekarang sekitar 70 persen penduduk menggantungkan hidup dari sektor pertanian atau mempunyai mata pencaharian sebagai petani, akan tetapi nasib petani dari hari ke hari kian terpuruk. Tingkat kesejahteraannya tidak membaik seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi yang semestinya dinikmati bersama. Petani semakin terpuruk disertai posisi tawar mereka lemah sehingga masalah yang dihadapi ibarat sebuah lingkaran yang tak berujung pangkal.

Kebijakan dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang pertanian (harga minimum, harga maksimum, subsidi) seolah selalu menempatkan pertanian pada posisi yang diperhatikan, namun dalam kenyataan membuktikan bahwa pertanian menjadi sektor yang inferior dalam pengembangannya. Dampak faktor internal (dalam negeri) ditunjang faktor eksternal (liberalisasi perdagangan) adalah pada keterpurukan pertanian yang pada gilirannya menurunkan kesejahteraan petani. (Sugeng Raharto : 2010 : 83)

Pemberdayaan petani dapat dilakukan melalui optimalisasi peran lembaga sosial kemasyarakatan, peningkatan pendidikan dan penguasaan pengetahuan dan teknologi tepat guna maupun pemindahan penduduk ke lokasi lahan yang lebih luas. Pemerintah berfungsi hanya sebagai fasilitator dan pedamping yang berfungsi hanya sebagai mediator, motivator

sekaligus fasilitator dan dinamisor sehingga petani didorong lebih aktif tidak hanya menunggu instruksi, petani harus dilibatkan dalam perumusan, persiapan dan pelaksanaan program pemberdayaan. Pemberdayaan petani melalui kebijakan yang secara proposional mendorong kemajuan sektor pertanian yang memihak kepada petani, agar petani terbebas dari kemiskinan dan memiliki pendapatan yang semakin meningkat. Reformasi pola pikir petani agar dinamis, mandiri dan mengelola usaha taninya secara aktif sehingga peka terhadap perkembangan pasar merupakan langkah awal yang harus diperhatikan guna meningkatkan pendapatan sebagai strategi peningkatan kesejahteraan petani.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani menjelaskan bahwa perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.

Penelitian terdahulu oleh Dyah Puspita Ratna, Wuradji, Nur Djazifah ER (2012) Pemberdayaan Petani Melalui Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) menjelaskan bahwa lemahnya aksesibilitas petani terhadap kelembagaan layanan usaha misalnya lembaga keuangan, lembaga pemasaran, lembaga sarana produksi pertanian, informasi, rendahnya tingkat pendidikan petani yang kurang mampu menerima inovasi baik berupa cara tanam, pupuk, jenis bibit padi unggul serta lemahnya daya saing petani dalam pemasaran produksi menjadi salah satu kendala yang cukup berpengaruh terhadap kelangsungan hidup petani. Sehingga dibentuklah suatu organisasi masyarakat tingkat desa dengan harapan mampu membantu para petani yakni Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Kemudian dalam penelitian terdahulu oleh Dwi Sadono (2008) tentang Pemberdayaan Petani: Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian Di Indonesia menjelaskan bahwa petani perlu diberdayakan salah satunya dengan Penyuluhan pertanian mempunyai peran untuk membantu petani agar dapat menolong dirinya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya secara baik dan memuaskan sehingga meningkat derajat kehidupannya. Dengan demikian nilai penting yang dianut dalam penyuluhan adalah pemberdayaan sehingga terbentuk kemandirian petani.

Salah satu program untuk pertanian adalah Holtikultura. Pengembangan Kawasan Agribisnis Hortikultura (PKAH) merupakan salah satu implementasi kebijakan

Kementerian Pertanian, bahwa pembangunan komoditas unggulan diarahkan pada pengembangan kawasan yang terpadu secara vertikal dan/atau horizontal dengan konsolidasi usaha produktif berbasis lembaga ekonomi masyarakat yang berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun internasional. Program tersebut perlu didukung secara optimal agar memberi dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan ekspor dan kesejahteraan petani.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Direktorat Jenderal Hortikultura mengalokasikan sejumlah anggaran melalui pola penyaluran dana dekonsentrasi bagi Dinas Pertanian tingkat provinsi beserta UPT nya dan dana tugas pembantuan kepada Dinas Pertanian tingkat kabupaten/kota. Dana APBN tahun 2014 yang sangat terbatas tersebut, harus digunakan dengan sebaik-baiknya dengan mengacu kepada prinsip efisiensi dan efektivitas agar sasaran pengembangan hortikultura tahun 2014 dapat dicapai.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Holtikultura. Dijelaskan bahwa Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. Direktorat Jenderal Hortikultura telah diberi amanat untuk melaksanakan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Hortikultura Berkelanjutan, mencakup pengembangan komoditi

sayuran, buah, tanaman obat dan florikultura, serta pengembangan sistem perbenihan, sistem perlindungan hortikultura, dan dukungan manajemen teknis. Berbagai kegiatan telah dilakukan baik di pusat maupun daerah (propinsi/kabupaten/kota) dan dilaksanakan oleh berbagai institusi. Sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan hortikultura melalui dukungan dana APBN.

Kemudian bentuk pemberdayaan yang dilakukan pemerintah lainnya adalah dalam program Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT). Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) adalah salah satu metode penyuluhan dalam penerapan PHT untuk peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani dalam pengelolaan OPT. SLPHT berupaya mewujudkan petani sebagai ahli PHT, yaitu sebagai imanajer yang mampu mengatasi segala permasalahan di lahan usahatannya secara mandiri. SLPHT dipilih sebagai metode pemberdayaan petani karena memiliki kelebihan-kelebihan diantaranya; berprinsip pada pendidikan orang dewasa, cara belajar lewat pengalaman, perencanaan partisipatoris, keputusan bersamaan anggota kelompok, petani sebagai manajer usaha taninya, materi pelatihan berdasarkan kebutuhan lapangan/kurikulum rinci dan terpadu, pelatihan selama satu siklus perkembangan tanaman / satu musim tanam.

Usaha menciptakan dan memperkuat petani sebagaimana

usaha tani tersebut tidak bisa lepas dengan peran pemandu yang mampu memfasilitasi mereka dalam kegiatan SLPHT. Pemandu lapang PHT haruslah sosok yang memiliki ketrampilan dalam hal kepemanduan, kepemimpinan dan seluk beluk pelatihan partisipatoris yang berazaskan pada proses belajar dari pengalaman, dan pendidikan orang dewasa (andragogi). Pemandu lapangan PHT bisa berasal dari petugas atau pun petani alumni SLPHT. SLPHT dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keahlian petani/kelompok tani dalam menganalisa data dan informasi agro ekosistem, memasyarakatkan dan melembagakan penerapan PHT dalam pengelolaan usaha tani dan meningkatkan pengamanan produksi terhadap gangguan OPT dalam pencapaian sasaran produksi, produktivitas dan peningkatan kesejahteraan petani.

Potensi pengembangan Pertanian yang didalamnya terdapat sector Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Bintan memiliki peluang potensi yang sangat baik. Hal ini terlihat bahwa dari luas lahan potensial Tanaman Pangan seluas 1.050 Ha yang telah diusahakan baru seluas 60 Ha. Demikian juga dengan Hortikultura lahan potensinya adalah seluas 21.611 Ha dan baru diusahakan seluas 3.664 Ha.

Di Kabupaten Bintan, potensi pengembangan Tanaman Pangan yang meliputi Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Kedelai cukup baik dan sangat potensial. Untuk melihat potensi pengembangan dan luasan areal yang telah diusahakan.

Pembangunan pertanian yang didalamnya mencakup sektor tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Bintan selain mengacu pada Rencana Pembangunan Kabupaten Bintan juga mengacu kepada program nasional yaitu program Pengembangan Agribisnis dan Peningkatan Ketahanan Pangan serta Peningkatan Sarana Produksi Pertanian.

Salah satu program yang diikuti oleh petani di Kabupaten Bintan adalah Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT). Kegiatan SLPHT ini dilaksanakan dengan tujuan agar para petani memiliki pengetahuan dalam pengendalian hama terpadu sehingga dengan bekal pengetahuan tersebut mereka bisa dan mampu mengendalikan serangan hama jika sekiranya nanti terjadi serangan hama dan penyakit di lahan pertanian mereka masing-masing.

Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) sangat di harapkan oleh petani karena program ini mampu meningkatkan pendapatan petani, sebelumnya pendapatan kelompok tani hanya sebatas 20-50 kg karena terserang hama, namun setelah adanya Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) petani jadi memahami cara mengendalikan hama dan hasil produksi meningkat menjadi 50 kg lebih.

Namun di lapangan masih ditemui permasalahan hal ini dapat dilihat dari Di Kabupaten Bintan ada 75 petani yang sudah mengikuti Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT), sehingga

masih banyak petani yang belum mengikuti program ini. (Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan)

Berdasarkan uraian diatas, dan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dan menyusun dalam satu usulan penelitian dengan judul: **“PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI PROGRAM SEKOLAH LAPANGAN PENGENDALIAN HAMA TERPADU DI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014”**

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini sasaran pemberdayaan itu sendiri adalah ketidakberdayaan masyarakat. Banyak hal yang harus dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi ketidakberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan strategi yang tepat kemudian dilakukan upaya-upaya terpadu dan menyeluruh melalui program Pemberdayaan. Karena masih ada permasalahan yaitu akses yang terbatas, kemudian sarana prasarana yang masih tradisonal. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Pemberdayaan Petani Melalui Program Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu Di Kabupaten Bintan Tahun 2014?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah: Untuk mengetahui Pemberdayaan Petani

Melalui Program Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu Di Kabupaten Bintan Tahun 2014.

D. Konsep Operasional

Penelitian ini mengacu pada pendapat Tim Perumus Strategi Pembangunan Nasional (Riant Nugroho, 2008) mengemukakan, ada empat indikator pemberdayaan.

1. Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di dalam lingkungan.
2. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumber daya yang terbatas tersebut.
3. Kontrol, yaitu bahwa pengawasan atas pemanfaatan sumber daya-sumber daya tersebut.
4. Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bahwa dengan metodologi kualitatif penelitian melakukan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan kualitatif akan memperoleh suatu pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran, meneliti kata-kata,

laporan terinci dari pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Melalui metode deskriptif juga dapat membantu menemukan pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/ obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif peneliti mampu mendeskripsikan data yang peneliti dapat dilapangan dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat.

G. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian karena dengan analisa data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Analisa data yang dilakukan semenjak awal sampai akhir penelitian bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam data. Data yang diperoleh akan dianalisa melalui analisa deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dilukiskan atau digambarkan secara sistematis sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan

LANDASAN TEORITIS

Dalam konteks pemberdayaan, menurut Nursahbani Katjasungkana dalam diskusi Tim Perumus Strategi Pembangunan Nasional (Nugroho, 2008) mengemukakan, ada empat indikator pemberdayaan. 1) Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses

sumber daya-sumber daya produktif di dalam lingkungan. 2) Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumber daya yang terbatas tersebut. 3) Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya-sumber daya tersebut. 4) Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara. Sumodiningrat (dalam Nugroho: 2008) menjelaskan untuk melakukan pemberdayaan perlu tiga langkah yang berkesinambungan. 1) Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan harus dipihaki daripada laki-laki. 2) Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat. 3) Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Dalam penelitian ini yang dimaksud pemberdayaan adalah pemberdayaan yang dilakukan terhadap masyarakat petani Kabupaten Bintan dalam program SLPHT.

Konsep pemberdayaan dapat dikatakan merupakan jawaban atas realitas ketidakberdayaan (disempowerment). Mereka yang

tidak berdaya jelas adalah pihak yang tidak memiliki daya atau kehilangan daya. Mereka yang tidak berdaya adalah mereka yang kehilangan kekuatannya. Secara lebih lengkap Pambudi, (2003: 54-58) mengatakan bahwa suatu pemberdayaan memiliki maksud untuk :

1. Pemberdayaan bermakna kedalam, kepada masyarakat berarti suatu usaha untuk mentranspormasikan kesadaran rakyat sekaligus mendekati masyarakat dengan akses untuk perbaikan kehidupan mereka.
2. Pemberdayaan bermakna keluar sebagai suatu upaya untuk menggerakkan perubahan kebijakan-kebijakan yang selama ini nyata-nyata merugikan masyarakat. Pemberdayaan dalam segi ini bermakna sebagai pengendali yang berbasis pada upaya memperlebar ruang partisipasi rakyat

Pemberdayaan berarti berdaya, mampu, tahu, mengerti, paham termotivasi, berkesempatan, melihat peluang, dapat memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, tahu berbagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani menghadapi resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, mampu bertindak sesuai situasi. Pemberdayaan akan menghasilkan masyarakat yang dinamis dan progresif secara berkelanjutan sebab didasari oleh adanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik sekaligus (Slamet, 2003: 45). Untuk dapat memotivasi sehingga berdaya berarti

mampu, tahu, mengerti paham dan termotivasi maka dasar dari semua itu adalah sikap untuk dapat merubah perilaku. Sikap adalah determinan perilaku yang berkaitan dengan persepsi, kepribadian dan motivasi. Sikap merupakan suatu keadaan sikap mental yang terbentuk berdasarkan pengalaman dan menyebabkan timbulnya pengaruh khusus atas reaksi seseorang terhadap orang-orang, objek-objek dan merupakan bagian intrinsik dari kepribadian seseorang. Perubahan sikap bergantung dari upaya-upaya untuk mengubah perasaan-perasaan atau keyakinan-keyakinan (Winardi, 2004: 211-212).

Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah hal kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus dari hubungan antara subyek dan obyek. Proses ini mementingkan pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (power) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalirnya daya dari subyek ke obyek. Hasil akhir dari proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula obyek menjadi subyek (yang baru), sehingga realisasi sosial yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan realisasi antar subyek dengan subyek yang lain (Vidhyandika 1996:135). Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan. Menurut Tjandraningsih (1996:3), pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan.

Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan. Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain : pertama, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan kedua, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dua kecenderungan tersebut memberikan (pada titik ekstrem) seolah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu.

Kemiskinan dapat di artikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang, keluarga atau anggota masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar sebagaimana anggota masyarakat lain pada umumnya (abdulsyani,2002:190). Sedangkan kemiskinan menurut departemen sosial Republik Indonesia (Depsos RI) adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang

yang tidak terpenuhi Hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan menyambungkan kehidupan yang bermatabat.

Kemiskinan adalah teori, fakta dan kebijakan bahkan masalah yang sudah sejak lama ada dan hampir dapat dikatakan akan tetap menjadi “kenyataan abadi”. Kemiskinan selalu mendapatkan tempat yang cukup penting dalam pembahasan pembangunan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002:3).

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya (BPS dan Depsos,2002:4).

Kemiskinan adalah permasalahan yang sifatnya *multidimensional*. Pendekatan dengan satu bidang ilmu tertentu tidaklah mencukupi untuk mengurai makna dan fenomena yang menyertainya. Definisi secara umum yang lazim dipakai dalam perhitungan dan kajian-kajian akademik adalah pengertian kemiskinan yang diperkenalkan oleh Bank Dunia yaitu sebagai

ketidakmampuan mencapai standar hidup minimum (Word Bank, 2000).

Dari segi faktor penyebabnya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan kultural, kemiskinan sumber daya ekonomi, dan kemiskinan struktural. Menurut Surbakti (Usman, 2006: 136), kemiskinan kultural bukanlah bawaan melainkan akibat dari tidak kemampuan menghadapi kemiskinan yang berkepanjangan. Kemiskinan bukanlah sebab melainkan akibat. Sikap-sikap seperti ini diabadikan melalui proses sosialisasi dari generasi ke generasi.

Beberapa pandangan tentang pemberdayaan masyarakat, antara lain sebagai berikut : (Ife, 1996:59)

1. Struktural, pemberdayaan merupakan upaya pembebasan, transformasi struktural secara fundamental, dan eliminasi struktural atau sistem yang operesif.
2. Pluralis, pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan daya sesorang atau sekelompok orang untuk dapat bersaing dengan kelompok lain dalam suatu aturan tertentu.
3. Elitis, pemberdayaan sebagai upaya mempengaruhi elit, membentuk aliniasi dengan elit-elit tersebut, serta berusaha melakukan perubahan terhadap praktek-praktek dan struktur yang elitis.
4. Post-Strukturalis, pemberdayaan merupakan upaya mengubah diskursus

serta menghargai subyektivitas dalam pemahaman realitas sosial. Hakikat dari konseptualisasi pemberdayaan berpusat pada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain manusia dan kemanusiaan sebagai tolok ukur normatif, struktural, dan substansial.

Dengan demikian konsep pemberdayaan sebagai upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah, negara, dan tata dunia di dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people centred, participatory, empowering, and sustainable” (Chambers, 1995).

Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan. Pemberdayaan masyarakat adalah merupakan tindakan memandirikan masyarakat agar dapat memperbaiki serta menentukan masa depan kehidupannya sesuai keinginan. Melalui pemberdayaan potensi-potensi yang dimiliki, seperti pengetahuan, modal, gagasan, dan keterampilan.

Saat ini banyak program pemberdayaan yang mengklaim sebagai program yang bedasar kepada keinginan dan kebutuhan

masyarakat (*bottom up*), ironisnya masyarakat tetap saja tidak merasa memiliki akan program-program tersebut sehingga tidak aneh banyak program yang hanya seumur masa proyek dan berakhir tanpa dampak berarti bagi kehidupan masyarakat. Memberdayakan masyarakat petani berarti menciptakan peluang bagi masyarakat petani untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Friedmann (1992; 32-33) mengemukakan bahwa masyarakat menempatkan (3) tiga kekuatan sebagai sumber utama pemberdayaan, yakni sosial, politik dan psikologis. kekuatan sosial menyangkut akses terhadap dasar-dasar produksi tertentu suatu masyarakat, misalnya informasi, pengetahuan dan keterampilan, partisipasi dalam organisasi sosial, dan sumber-sumber keuangan. apabila ekonomi masyarakat tersebut meningkat aksesnya pada dasar-dasar produksi diatas, maka kemampuannya dalam menentukan dan mencapai tujuannya juga meningkat.

Peningkatan kekuatan sosial dapat dimengerti sebagai suatu peningkatan akses masyarakat terhadap dasar-dasar kekayaan produktif mereka. kekuatan politik meliputi akses setiap anggota keluarga terhadap proses pembuatan keputusan, terutama keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka sendiri. kekuatan politik bukan hanya kekuatan untuk memberikan suara, tetapi juga kekuatan untuk menjadi vokal dan bertindak secara kolektif.

pengaruh politik pada yang efektif akan tampak tidak hanya pada waktu suara-suara individu “meninggi” sebagai pengaruh dari partisipasi individu terhadap basis lokal maupun personal, melainkan juga pada saat suara tersebut didengungkan bersama-sama dengan suara-suara asosiasi-asosiasi politik yang lebih luas, misalnya partai, gerakan sosial, atau kelompok yang berkepentingan.

Selain kedua kekuatan yang dikemukakan diatas, masyarakat juga mengandalkan eksistensinya dengan kekuatan psikologis. kekuatan psikologis digambarkan sebagai rasa potensi individu (*individual sense of potency*) yang menunjukkan perilaku percaya diri. pemberdayaan psikologis seringkali tampak sebagai suatu keberhasilan dalam komponen sosial politik. rasa potensi pribadi yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh positif dan kursif terhadap perjuangan masyarakat yang secara terus menerus berusaha untuk meningkatkan kekuatan sosial politiknya.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Potensi Kabupaten Bintan

Kabupaten Bintan sebelumnya bernama Kabupaten Kepulauan Riau. Perubahan nama ini dimaksudkan agar tidak timbul kerancuan antara Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Kepulauan Riau dalam hal administrasi dan korespondensi sehingga nama Kabupaten Kepulauan Riau (Kepri) diganti menjadi Kabupaten Bintan. Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006,

tertanggal 23 Februari 2006. Kabupaten ini memiliki sejumlah peluang di bidang pariwisata, industri, perikanan, pertambangan dan Peternakan. Dibidang pariwisata, iklim dan kondisi alam yang eksotis menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Misalnya Lagoi yang memiliki pemandangan laut dan pantai yang telah menarik minat lebih dari 40.000 wisatawan mancanegara. Dilahan seluas 23.000 ha terdapat 7 hotel bertaraf internasional, 2 Resort dan 2 lapangan golf bertaraf internasional dengan 36 hole.

Untuk menarik minat investor, pemerintah setempat telah mengalokasikan lahan seluas 500 ha di Kijang dan 100 ha di Bintan Barat sebagai areal hutan industri dan pengembangan pantai. Pengembangan pariwisata dilakukan dengan bekerja sama dengan Singapura untuk membangun Bintan Utara.

Pada sektor industri, Kabupaten ini mempunyai kawasan industri di Lobam sebagai salah satu hasil dari kerjasama ekonomi antara Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Terdapat 4000 ha lahan yang dipakai oleh 18 perusahaan elektronik, 14 perusahaan garmen dan lain-lain.

Industri perikanan juga berperan penting di kabupaten ini dengan didukung oleh luas wilayah perairan seluas 95%. Para investor disarankan untuk mengembangkan sektor ini di wilayah timur, yaitu di wilayah Tambelan dengan 54 pulau. Wilayah ini cocok untuk perikanan dan budidaya terumbu karang seluas 117,480 ha. Pariwisata laut cocok untuk wilayah ini dengan didukung

oleh pasir pantai yang bersih dan putih.

Pada sektor peternakan, Kabupaten Bintan merupakan daerah yang sangat potensial dalam pengembangan ternak sapi (jenis sapi Bali), kambing, babi, itik dan ayam (buras dan ras pedaging/petelur) sebagai penyuplai pasokan bahan pangan asal hewan di Kepulauan Riau, khususnya untuk daerah perkotaan seperti Kota Kijang, Kota Tanjung Uban dan Kota Tanjungpinang. Tercatat populasi ternak Sapi di Bintan hampir mendekati 1000 ekor pada tahun 2010, angka ini akan diupayakan untuk terus meningkat seiring dengan tingginya permintaan daging dan permintaan sapi, khususnya sapi potong pada saat hari raya Idul Adha (Hari Raya Kurban). Ayam Buras: 199.383 ekor, Kambing: 900 ekor, Itik: 3.663 ekor, Babi: 3.500 ekor, Ayam Ras Petelur: 265.700 ekor dan Ayam Ras Pedaging: 2.499.700 ekor. Untuk menjaga kesehatan ternak, di Kabupaten Bintan terdapat 5 orang Dokter Hewan dan dibantu oleh beberapa paramedis veteriner dengan ditunjang oleh 2 buah sarana Pos Kesehatan Hewan (Poskeswan) yang berlokasi di Desa Sri Bintan dan Desa Ekan Anculai Kecamatan Teluk Sebong, selain Poskeswan, di Kabupaten Bintan juga terdapat Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang berlokasi di Kecamatan Bintan Utara.

Kabupaten Bintan mempunyai potensi pertanian tanaman pangan yang cukup menjanjikan, dan akan di manfaatkan secara optimal. Potensi dan peluang investasi sektor pertanian didalam rencana tata ruang Kabupaten Bintan tersebar di seluruh

wilayah kecamatan. Kabupaten Bintan terletak antara 1° 15' LU sampai dengan 0° 48' LS dan antara 109° BT 103° 11BT serta berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Natuna, Negara Vietnam dan Kamboja.
- b. Sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatra Selatan, Bangka Belitung dan Jambi.
- c. Sebelah Timur dengan Provinsi Kalimantan Barat
- d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Karimun, Kota Batam dan Semenanjung Malaysia.

Luas wilayah Kabupaten Bintan meliputi lebih kurang 100.929,85 Km² yang terdiri dari luas daratan 4.063,85 Km² dan luas lautan 96.866 Km² dengan jumlah pulau lebih kurang 539 pulau yang terdiri dari pulau besar 3 buah dan pulau kecil lebih kurang 536 buah. Kondisi alam Kabupaten Bintan sebagian berbukit bukit dan lembah yang landai dipesisir pantai. Jenis tanah terdiri dari Organosol, Clayhumik, Latosol, Litosol dan Podzolik.

B. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB

Pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Pentingnya peranan ini menyebabkan bidang ekonomi diletakkan pada pembangunan ekonomi dengan titik berat sektor pertanian. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri

,meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja dan mendorong pemerataan kesempatan berusaha.

Dalam Struktur Ekonomi Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014, sektor-sektor yang memiliki nilai kontribusi besar terhadap PDRB adalah sektor Industri Pengolahan sebesar 50,53%, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 20,76%, sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,94% dan sektor Pertanian sebesar 5,78%, sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 3,80%, sektor Bangunan 4,58%, sedangkan sektor lain seperti Listrik, Gas dan Air Bersih Keuangan, Persewaan dan Jasa, masing-masing memberikan kontribusi kurang dari 3,00%..

Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Pada tahun 2010 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah sebesar 7,21%, dan pencapaian tahun 2014 adalah sebesar 5,78 %. Berdasarkan hasil capaian tahun 2013 yakni sebesar 5,69%, maka capaian tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 0,1%. Secara umum, capaian Kontribusi Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena kontribusi sektor lain (pariwisata) ternyata lebih meningkat dan mampu secara dominan mempengaruhi PDRB Kabupaten Bintan meskipun dilihat dari hasil capaian produksi, sektor pertanian mengalami peningkatan. Indikator kinerja lainnya dalam meningkatnya kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB dan Nilai Tukar Petani (NTP)

adalah Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan. Pada tahun 2010, capaian produksi komoditi unggulan perkebunan sebesar 24.513,98 ton, dan pada tahun 2014 sebesar 112.157,50 ton. Angka ini merupakan angka akumulasi dari tahun sebelumnya, dimana Tahun 2013 tercatat realisasinya adalah 107.195,50 ton ditambahkan dengan capaian Tahun 2014 sebesar 4.962 ton menjadi 112.157,50 ton.

Capaian prestasi yang melampaui target ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah investasi dan pembangunan sektor perkebunan berjalan sangat baik dan kondusif. Bahkan beberapa kelompok tani masyarakat dan perusahaan melakukan pembukaan lahan perkebunan baru. Selain itu, penambahan luas Tanaman Menghasilkan (TM) dari komoditi kelapa sawit, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar Swasta (PT. Tirta Madu) dan perkebunan karet pada PT. Numbing yang melaksanakan kegiatan perkebunannya di pulau tersendiri, yakni Pulau Mapur, Kecamatan Bintan Pesisir dan PT. Pulau Bintan Djaya juga meningkat. Pada tahun 2010, produksi komoditi hortikultura adalah sebesar 12.811 ton dan pada tahun 2014 adalah 44.509 ton.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2013, capaian tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 179.14%, hal ini disebabkan oleh faktor cuaca berupa kemarau cukup panjang yang melanda Kabupaten Bintan mulai dari Bulan Februari hingga pertengahan tahun 2014, yang menyebabkan produksi hortikultura, khususnya tanaman sayuran dataran rendah mengalami penurunan

produksi. Bahkan di beberapa tempat terjadi kebakaran lahan dan hutan yang menyebabkan turunnya produksi komoditi hortikultura di Bintan.

C. Nilai Tukar Petani

Salah satu alat ukur kesejahteraan petani yang digunakan adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang dihitung dari rasio harga yang diterima petani (HT) terhadap harga yang dibayar petani (HB). Berdasarkan data NTP di Kabupaten Bintan, selama tahun 2010 sampai dengan 2014, NTP mencapai lebih dari 100, artinya petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibandingkan tingkat kesejahteraan petani sebelumnya. Sampai dengan tahun 2014, NTP Kabupaten Bintan mencapai 109%.

D. Program SL-PHT

SL-PHT bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani/kelompok tani tentang empat prinsip PHT yaitu:

1. Budidaya Tanaman Sehat;
2. Pelestarian dan Pemanfaatan Musuh Alami;
3. Pengamatan rutin/berkala;
4. Petani menjadi ahli PHT.

Dengan SL-PHT diharapkan petani/ kelompok tani mau dan mampu secara mandiri menerapkan PHT dalam pengelolaan kebunnya. Pendekatan teknis pelaksanaan SL-PHT sebagai berikut:

1. SL-PHT dilaksanakan oleh Pemandu Lapang (PL) dengan pembinaan oleh Pusat

- (Direktorat Perlindungan Perkebunan dan UPT Pusat), Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan.
2. Pendekatan andragogi (metoda belajar orang dewasa) yaitu belajar dari pengalaman di lapangan sehingga mereka mau dan mampu menerapkannya secara mandiri.
 3. Proses belajar mengajar dilakukan dengan metoda partisipasi aktif, mencari, dan menumbuhkan kepercayaan sendiri, serta mengambil keputusan bersama dalam menentukan tindakan pengelolaan kebun.
 4. Dilakukan dalam kelompok yang terdiri dari 25 petani laki-laki dan perempuan. Selanjutnya kelompok tersebut dibagi menjadi 5 sub kelompok kecil masing-masing 5 petani.
 5. Kebun sebagai sarana belajar utama.
 6. Sosialisasi sebelum penetapan CP/CL.
 7. Satu kelompok mengusahakan komoditas pertanian yang sama.
 8. Tersedia pemandu lapang di Kabupaten pelaksana SLPHT . Jika kabupaten/kota tidak tersedia pemandu dapat menggunakan pemandu lapang dari kabupaten/kota terdekat.

Persiapan SLPHT Kegiatan persiapan meliputi upaya koordinasi dengan para pihak terkait dan pertemuan-pertemuan untuk

menentukan pemandu lapangan, pemilihan lokasi, pemilihan kelompok tani, penentuan peserta, tempat, waktu dan lahan belajar, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti materi belajar, bahan dan alat.

Pertemuan tingkat kecamatan dan desa Pertemuan persiapan SLPHT dilakukan di tingkat kecamatan dengan mengikutsertakan camat, petugas POPT, mantri tani, penyuluh pertanian, dan tokoh masyarakat. Sedangkan pertemuan persiapan SLPHT di tingkat desa mengikutsertakan pejabat dan tokoh masyarakat tingkat desa, seperti : kepala desa, sekretaris desa, kaur pembangunan, petugas POPT, penyuluh pertanian, ketua kelompok tani, dan wakil tokoh wanita tani. Pertemuan tingkat kecamatan dan desa dapat disatukan penyelenggaraannya dan dilakukan paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum kegiatan SLPHT dilaksanakan. Pertemuan tingkat kelompok tani Pertemuan tingkat kelompok tani diselenggarakan untuk menentukan peserta SLPHT yang dibatasi jumlahnya paling banyak 25 orang peserta aktif, serta untuk membangun kesepakatan tentang waktu dimulainya SLPHT, hari kegiatan, lokasi lahan belajar, tempat belajar, materi pelajaran, dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan SLPHT.

Pelaksanaan SLPHT

- a. Pengaturan proses belajar Setiap SLPHT dipandu oleh pemandu pelatihan yang memenuhi kriteria. Peserta SLPHT dibagi dalam kelompok kecil beranggotakan masing-

- masing lima (5) orang dan diketahui oleh seorang ketua kelompok. Kelompok tersebut merupakan unit belajar bersama yang harus dapat bekerjasama satu dengan yang lain. Kerjasama antar kelompok diatur secara bersama dibawah koordinasi ketua umum yang dipilih secara bersama.
- b. Tempat belajar dan lahan belajar SLPHT tidak terikat dengan ruang kelas, sehingga belajar dapat dilakukan di gubug pertemuan petani, di bawah pohon rindang, di halaman rumah dan di tempat lain yang terbuka dan berdekatan dengan lahan belajar. Lahan belajar terdiri dari dua (2) pertanaman padi, masing-masing berukuran 500 m² dan dikelola dengan perlakuan PHT dan perlakuan konvensional.
 - c. Bahan dan alat belajar Bahan dan alat belajar yang digunakan harus bersifat praktis, sederhana dan mudah didapat, terdiri dari alat tulis dan buku catatan pribadi, kertas plano/koran dan spidol, bahan praktikum, petunjuk lapangan dan alat peraga. Bahan dan alat belajar tersebut seharusnya disediakan oleh penyelenggara program dan atau diupayakan secara mandiri oleh peserta.
 - d. Jangka dan waktu SLPHT Jangka waktu SLPHT setidaknya satu musim tanam, sejak tanam sampai panen, ditambah dengan waktu satu pertemuan persiapan di awal dan pertemuan refleksi di akhir SLPHT. Jangka waktu SLPHT dapat berkisar antara 14-16 minggu, tergantung daerah.
 - e. Pertemuan belajar bersama dilakukan secara berkala seminggu sekali, dengan waktu efektif 6 jam pertemuan di pagi hari. Dengan demikian, akan ada sampai 14-16 kali pertemuan mingguan. Proses belajar bersama Kerja lapangan Kerja lapangan adalah kerja yang berkaitan dengan pengelolaan lahan belajar/petak perlakuan pada petak studi masing-masing kelompok. Kerja lapangan ditentukan berdasarkan kesepakatan kelompok, seperti pengaturan air, penyiangan, tindakan pengendalian dan sebagainya. Kerja lapangan dapat dilakukan diluar jadwal dan hari pertemuan.
 1. Pengamatan agroekosistem Tiap kelompok mengamati sub petak studi yang telah ditentukan. Masing-masing kelompok mengamati dengan menggunakan metode pengamatan dan jumlah rumpun contoh yang diamati disesuaikan dengan buku pedoman lapangan SLPHT. Unsur yang diamati meliputi : keadaan tanaman, serangga

- hama, keadaan air, keadaan cuaca, dan lainnya.
2. Menggambar agroekosistem
Gambar agroekosistem merupakan gambar kondisi pertanaman, dari mulai keadaan hama penyakit, serta kondisi lingkungan fisik pada saat pengamatan sampai penggambaran perlakuan yang pernah dilakukan sebelumnya. Penggambaran meliputi : gambar tanaman lengkap, gambar serangga hama, gambar populasi hama, gambar gejala, dan gambar keadaan kondisi lingkungan fisik.
 3. Diskusi kelompok
Dimaksudkan untuk mengkaji agroekosistem secara sistematis dan mendalam sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dan kondisi agroekosistem pada saat itu sebagai dasar untuk pengambilan keputusan pengelolaan agroekosistem berikutnya. Dalam diskusi kelompok dapat dilakukan analisis perbandingan antara petak perlakuan PHT dan konvensional.
 4. Diskusi pleno
Diskusi pleno merupakan tahapan kegiatan terpisah dengan diskusi kelompok, dilakukan dalam gabungan kelompok. Untuk efisiensi waktu dalam diskusi pleno ini setiap wakil dari kelompok hanya mengutarakan kesimpulan dan keputusan kelompoknya.
 5. Topik khusus
Topik khusus yang dipelajari dalam setiap pertemuan dipilih berdasarkan permasalahan pokok setempat yang dihadapi oleh petani pada saat itu. Apabila ada waktu pertemuan tidak menghadapi masalah, maka dapat diberikan topik khusus yang sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman.
 6. Dinamika kelompok
Kegiatan ini dinamika kelompok dimaksudkan untuk menumbuhkan kekompakan dan kegairahan peserta dalam belajar (suasana dinamis). Materi dinamika

- kelompok dapat disesuaikan dengan kondisi kelompok pada saat itu.
7. Studi khusus Studi khusus merupakan kegiatan pendukung untuk mendorong agar peserta SLPHT memahami secara benar konsep, prinsip dan teknologi PHT. Studi khusus tersebut harus bersifat : praktis, sederhana, mudah dilaksanakan dan membutuhkan waktu relatif singkat, serta dapat menjawab permasalahan petani.
 8. Praktek petani dalam penerapan PHT di lahan usaha taninya Setelah selesai proses belajar, peserta diharapkan dapat langsung mempraktekkan pengetahuan dan keterampilan pada lahan usaha taninya. Hasil temuan dari lahan masing-masing dapat dijadikan bahan diskusi pada pertemuan berikutnya.
 9. Hari Lapangan petani SLPHT Hari lapangan petani merupakan media pertemuan antara petani SLPHT dengan petani yang belum mengikuti SLPHT, dalam rangka memperkenalkan kegiatan SLPHT yang sedang berlangsung. Kegiatan ini diselenggarakan oleh petani pada saat akhir kegiatan.
 10. Evaluasi belajar dan sertifikat kelulusan. Evaluasi proses belajar dilakukan untuk mengetahui tingkat kehadiran, aktivitas dan pemahaman peserta terhadap materi yang dipelajari. Metode evaluasi terdiri dari uji ballot box sebelum dan sesudah pelaksanaan SLPHT, wawancara langsung dan pengisian matrik kualitas

ANALISA DAN PEMBAHASAN

1. Akses

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa akses sebenarnya sudah terbuka seperti melalui papan informasi, kemudian ketua kelompok tani juga diberikan surat pemberitahuan, namun tidak semua petani mengetahuinya, ada syarat yang harus dipenuhi petani untuk mendapatkan program ini, Ketentuan dalam pelaksanaan SLPHT ini meliputi lokasi merupakan sentra produksi tanaman pangan dan endemis serangan OPT, luas hamparan minimal 10 Ha, pelaksanaan kegiatan selama 1 musim tanam (MH dan atau MK), terdiri dari 14 kali pertemuan (1 kali persiapan, 12 kali mingguan, 1 kali field day), mendata dan melaporkan produktivitas sebelum dan sesudah SLPHT. Peserta adalah petani,

diupayakan komposisi laki-laki : perempuan adalah 60% : 40%, peserta aktif dalam kegiatan pertanian, sanggup mengikuti SLPHT selama satu musim tanam, responsive terhadap inovasi teknologi, berjiwa kooperatif, berasal dari satu hamparan usaha tani dan diutamakan generasi muda. Pemandu SLPHT adalah pemandu yang memiliki kualifikasi tertentu dalam kepemanduan. Asas dan metode pelaksanaan SLPHT mengacu pada Pedoman Penerapan PHT.

2. Partisipasi

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dianalisa bahwa sebagian petani sudah mengikuti program ini, semua petani sebenarnya ingin berpartisipasi namun memang kegiatan ini dilakukan bertahap dan terbatas sehingga belum semua petani mendapatkan kesempatan dalam program pemberdayaan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu. Sekolah Lapangan ini dirancang sedemikian rupa sehingga kesempatan belajar petani terbuka selebar-lebarnya agar para petani berinteraksi dengan realita mereka secara langsung, serta menemukan sendiri ilmu dan prinsip yang terkandung di dalamnya. Hal yang ditonjolkan dalam Sekolah Lapangan Hama Terpadu (SLPHT) adalah peran aktif petani sebagai pelaku, peneliti, pemandu, dan manajer lahan yang ahli.

Proses belajar dalam program sekolah lapangan, erat kaitannya dengan pandangan terhadap sifat dasar manusia sebagai makhluk hidup yang aktif dan kreatif yang senantiasa ingin lebih mendalami akan pengertian tentang arti dan

maksud hidup dalam keberlangsungan hidup mereka kedepannya yakni dengan mensejahterakan kehidupannya sendiri. Pelaksanaan program sekolah lapangan pengendalian hama terpadu (SLPHT) dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Masyarakat atau petani merupakan penanggung jawab utama dalam upaya perlindungan tanaman serta menemukan dan mengembangkan sendiri pengetahuan dari pengalaman dari diberikannya program sekolah lapangan. Pemerintah hanya akan melakukan tindakan pada kondisi kritis, jika masyarakat (petani) tidak mampu lagi mengatasi masalah yang ada.

Dengan demikian kesuksesan upaya perlindungan tanaman sangat tergantung terutama pada pengetahuan, pemahaman dan penerapan sistem dari pengendalian hama terpadu (PHT) oleh petani. Partisipasi masyarakat yang maksimal dalam pembangunan di bidang pertanian, melalui program Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) diharapkan mampu mendorong petani bisa benar-benar belajar dengan kesadaran penuh pada umumnya akan pentingnya belajar.

3. Kontrol

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat dianalisa bahwa pengawasan sudah dilakukan. Pengawasan perlu dilakukan untuk keberhasilan program SLPHT. Program SLPHT dikatakan berhasil apabila tujuan dari program SLPHT tersebut dapat dicapai dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Berbagai hal yang perlu dikaji pada

evaluasi program SLPHT meliputi beragam hal mengenai kondisi masyarakat, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kondisi sosial budayanya. Input meliputi beragam hal yaitu materi SLPHT, tenaga pelaksana, fasilitas dan dana yang disediakan untuk pelaksanaan program SLPHT.

Proses (process) meliputi survey dasar, pertemuan, musyawarah pra tanam, pembinaan petani penggerak, pelaksanaan SLPHT, lokakarya dan hari lapang tani, dan produk (product) meliputi beragam hal antara lain peningkatan kemampuan dan keterampilan petani dalam mengamati OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan teknologi pengendaliannya, peningkatan kerjasama kelompok dalam berusaha tani, dan peningkatan kualitas agro ekosistem

4. Manfaat

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat dianalisa bahwa Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu sudah memberikan dampak baik bagi petani. Latar belakang Pemerintah menciptakan program Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu adalah untuk peningkatan produksi pengelolaan dan peningkatan pendapatan petani. Peningkatan produksi pengelolaan dan pemasaran diharapkan mampu menambah nilai jual produk hasil pertanian. Sehingga akan mencapai pengentasan kemiskinan petani. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu atau disingkat SL-PHT merupakan suatu metode penyuluhan yang memadukan teori dan pengalaman petani dalam melakukan kegiatan usaha tani. Konsep ini

dilandasi oleh kesadaran petani akan arti pentingnya tuntutan ekologis dan pemanfaatan sumberdaya manusia dalam pengendalian hama. Pada prinsipnya, Pengendalian Hama Terpadu (PHT) berusaha untuk bekerjasama dengan alam, bukan melawannya. Sedangkan aktivitas kelompok tani menggambarkan, bagaimana petani dalam kelompoknya merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis, sosial maupun ekonomi secara bersama.

Berdasarkan keputusan pejabat pembuat komiyemen satker dinas pertanian kehutanan dan peternakan provinsi Kepulauan Riau Nomor : 9.9/SK/HORTI/IX/2014 tentang penetapan pelaksanaan kegiatan sekolah lapangan pengendalian hama terpadu holtikultura di Kabupaten Bintan dan Kota Batam pada kegiatan pengembangan sistem perlindungan tanaman holtikultura tahun anggaran 2014 menjelaskan bahwa rincian anggaran biaya kegiatan SLPHT Holtikultura pada kegiatan pengembangan sistem perlindungan tanaman holtikultura Kabupaten Bintan berjumlah Rp.65.940.000.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Pemberdayaan Petani Melalui Program Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu Di Kabupaten Bintan belum berjalan sebagaimana mestinya, masih ada yang harus diperbaiki, hal ini dapat dilihat dari :

Akses dalam program ini sangat terbatas karena pemerintah

kurang terbuka dalam pelaksanaan program ini sehingga tidak semua petani mampu merasakan program ini. Tidak hanya itu program ini dilakukan secara bertahap sehingga petani yang mengajukan proposal harus menunggu giliran mendapatkan program SLPHT ini. Dalam program Pemberdayaan Petani Melalui Program Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu Di Kabupaten Bintan yaitu Sebagian petani sudah mengikuti program ini, semua petani sebenarnya ingin berpartisipasi namun memang kegiatan ini dilakukan bertahap dan terbatas sehingga belum semua petani mendapatkan kesempatan dalam program pemberdayaan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpad

Sejauh ini pengawasan sudah dilakukan. Pengawasan perlu dilakukan untuk keberhasilan program SLPHT. Program SLPHT dikatakan berhasil apabila tujuan dari program SLPHT tersebut dapat dicapai dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Berbagai hal yang perlu dikaji pada evaluasi program SLPHT meliputi beragam hal mengenai kondisi masyarakat. Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu sudah memberikan dampak baik bagi petani. Latar belakang Pemerintah menciptakan program Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu adalah untuk peningkatan produksi pengelolaan dan peningkatan pendapatan petani. Peningkatan produksi pengelolaan dan pemasaran diharapkan mampu menambah nilai jual produk hasil pertanian. Sehingga akan mencapai

pengentasan kemiskinan petani. Namun masih ada hambatan dalam Pemberdayaan Petani Melalui Program Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu Di Kabupaten Bintan yaitu Sebagian petani sudah mengikuti program ini, semua petani sebenarnya ingin berpartisipasi namun memang kegiatan ini dilakukan bertahap dan terbatas sehingga belum semua petani mendapatkan kesempatan dalam program pemberdayaan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpad

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam Pemberdayaan Petani Melalui Program Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu Di Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut :

1. Harus ada pendataan yang benar terhadap jumlah petani agar setiap petani dapat merasakan program Pemberdayaan Petani Melalui Program Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu Di Kabupaten Bintan
2. Pemberdayaan sebaiknya dilakukan konsisten dan berkelanjutan sehingga tidak sampai di penyuluhan saja tetapi juga di damping saat di lapangan setelah mengikuti program tersebut.
3. Sebaiknya program ini berlanjut dari tahun ke tahun agar seluruh kelompok tani yang ada di Kabupaten Bintan dapat merasakan program Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu ini.

DAFTAR PUSTAKA**Buku-Buku:**

- Abdulsyani, 2002. *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- A. M. W. Pranarka dan Vidhandika Moeljarto, “Pemberdayaan (Empowerment)”, dalam Onny S. Priyono dan A.M.W Pranarka (eds), 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta, hal.44-46
- Arikunto, Suharsami. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Penerbit: Rineka Cipta.
- BPS/Badan Pusat Statistik dan Depsos/Departemen Sosial. 2002. *Penduduk Fakir Miskin Indonesia*. Jakarta: BPS
- Friedmann. 1992. *Empowerment The The Politics of Alternative Development*. Massachusetts: Blackwell Publishers.
- Hikmat, Hary, 2006, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora
- Labolo, Muhadam, 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*. RajaGarfindo Persada, Jakarta
- Moleong, Lexy. 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru, Jilid I*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Pambudi, dkk, 2003, *Politik Pemberdayaan; Jalan Mewujudkan. Otonomi Desa*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Rahim, A. dan Diah R. D. H. 2007. *Pengantar, Teori, dan Kasus Ekonomika Pertanian*. Cetakan Kedua. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Slamet, 2003, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, Cet. IV, Jakarta: Rieneka Cipta
- Soetomo. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulistiyani, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama

- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan pembangunan daerah otonom dan pemberdayaan masyarakat*. Jakarta : Citra Utama
- Suratiah, Ken. 2006. Ilmu Usahatani. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Syafiie, Kencana, Inu, DR. 2011. Manajemen Pemerintahan. Pustaka Reka Cipta.
- Usman, Abdhul Aziiz. 2006. Identifikasi karakteristik rumah tangga miskin yang mempengaruhi kemiskinan di Sumatera Barat. Tesis, MPKP UI
- Winardi. 2004. Manajemen Perilaku Organisasi, Jakarta : Pranada Media.

Jurnal

- Dyah Puspita Ratna, Wuradji, Nur Djazifah ER (2012) Pemberdayaan Petani Melalui Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN). Diklus, Edisi XVI, Nomor 02, September 2012
- Dwi Sadono (2008) tentang Pemberdayaan Petani: Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian Di Indonesia. ISSN: 1858-2664 Maret 2008, Vol. 4 No.1
- Sugeng Raharto. 2010. Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Petani Dan Pasar Perberasan

Guna Peningkatan Nilai Tukar Petani Serta Ketersediaan Pangan. J-SEP Vol. 4 No. 2 Juli 2010